

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan sebuah daerah dalam pengambilan keputusan secara leluasa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki suatu daerah dengan tujuan untuk kepentingan bersama yang mampu meningkatkan potensi daerah sendiri. Adanya otonomi daerah yang berarti menyerahkan sepenuhnya pengelolaan keuangan ditangan pemerintah daerah itu sendiri dengan menerapkan sistem akuntansi yang baik, karna sistem akuntansi merupakan pendukung utama terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan taransparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah yang berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 tentang bentuk dan isi dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) disusun serta disajikan sesuai dengan SAP. Berkenan dengan hal tersebut ditegaskan juga dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah haruslah menerapkan SAP berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual adanya pendapatan, serta beban, asset, utang, dan ekuitas diakui dalam suatu pelaporan finansial berbasis akrual, dan pendapatan, belanja, serta

pembiayaan yang diakui dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD. Dengan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan sehingga diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas dari kinerja pemerintah.

Fenomena yang terkait dengan akuntabilitas kinerja hingga saat ini yaitu masih rendahnya akuntabilitas kinerja, baik yang ada pada tingkat nasional maupun daerah yang terkadang masih memunculkan masalah pengelolaan keuangan daerah yang buruk. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan tersebut dengan oleh pemerintah Kota Palopo khususnya pada aparatur pemerintah daerah yaitu dengan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas demi mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik) sehingga mampu untuk menyediakan public service bagi masyarakat dan untuk pemerintah daerah haruslah membenahi diri agar dapat mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, terlebih lagi adanya tuntutan masyarakat yang semakin menguat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik terhadap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menuntut pemerintah agar penciptaan akuntabilitas harus dilakukan khususnya dalam bidang akutansi sesuai dengan yang telah ditentukan sehingga dapat mewujudkan terciptanya good governance (pemerintahan yang baik).

Akuntabilitas dipercaya mampu merubah kondisi dari suatu pemerintahan yang belum bisa memberikan pelayanan publik secara baik, menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Dengan melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan serta merta mendapatkan dukungan dari publik, karena

akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap publik. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukannya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, serta terukur dan logis sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah dapat berlangsung pada suatu daerah dapat berlangsung pada prinsip berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) merupakan serangkaian tata kelola dalam menjalankan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi, serta merupakan bagian dari pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Dalam melakukan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempermudah para petugas yang menjalankan fungsi dalam akuntansi agar mudah memahami serta bisa menjalankan proses akuntansi dengan cara yang baik dan benar. Apabila penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dilakukan secara benar dalam penyajian laporan keuangan, maka pertanggungjawaban laporan keuangan akan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dalam hal ini secara tidak langsung penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengelolaan pemerintah daerah yang akuntabilitas tidak lepas dari keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Laporan keuangan yang dibuat dengan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)

dengan begitu informasi keuangan yang dihasilkan dapat dijadikan dasar dari pengambilan suatu keputusan dalam pemerintahan dan juga dapat mewujudkan transparansi serta hal tersebut juga dapat digunakan sebagai sebuah alat untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan sangatlah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena kualitas laporan keuangan yang baik dapat memberikan sebuah dedikasi terhadap akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang telah dibuat.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah ialah kejelasan sasaran anggaran. Ketidakjelasan sasaran anggaran sudah dapat dipastikan akan menghadapi situasi sulit dalam pelaksanaannya bahkan bisa saja menjadi gagal, sedangkan kejelasan sasaran anggaran yang jelas dapat mendorong manajer lebih efektif dalam melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas, hal tersebutlah yang menjadi dasar mengapa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Aprilianti et al., 2020).

Pemerintah Kota Palopo merupakan salah satu bagian daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang meraih prestasi berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) (Ashari, 2020). Prestasi yang diperoleh pemerintah Kota Palopo dalam mengelola laporan keuangan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian khususnya pada kantor BPKAD Kota Palopo, serta untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran

memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo sehingga mendapatkan opini WTP empat kali berturut-turut. Bilamana faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang positif, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai contoh bagi pemerintahan daerah lainnya.

Faktor-faktor yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya telah diteliti oleh penelitian terdahulu dengan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mudrikah dan Ali (2018) dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah berpengaruh namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Namun terjadi perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017) yang menyimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mikoshi (2020) dan Pratama et al. (2019) hasil penelitian keduanya menyimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidaklah memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada perbedaan objek penelitian, serta adanya penambahan variabel lain sebagaimana yang disarankan oleh peneliti sebelumnya. Adapun variabel-variabel yang telah

diteliti oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Fathia (2017) pada SKPD di Provinsi Riau dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada penelitian tersebut, peneliti berharap dilakukannya penambahan variabel yang berbeda untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pratama et.al (2019) pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan penelitian yang dilakukan Mikhosi (2020) pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Se Sumatera Barat. Kedua penelitian tersebut menggunakan variabel-variabel yang sama yaitu dengan mengambil judul penelitian Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada penelitian tersebut, peneliti juga berharap adanya penambahan variabel lain yang diduga lebih berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan dari uraian diatas yang ternyata terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, serta untuk mengetahui pasti pengaruh dari setiap variabel, dan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel lain yang diduga lebih kuat pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti kembali. Adapun sarana yang dijadikan sebagai objek penelitian ini yaitu pada kantor BPKAD Kota Palopo dan dengan mengangkat suatu permasalahan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan**

## **Keuangan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari hasil uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada peneliatan ini yaitu:

1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo?
2. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo?
3. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dan manajemen khususnya dalam pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota palopo dengan memanfaatkan Sistem Akuntansi Permerintah Daerah (SAPD), Laporan Keuangan, dan Sasaran Anggaran.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Manfaat dari penelitaian ini bagi pemerintah diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan informasi tambahan untuk pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

#### **b. Bagi Peneliti**

Manfaat penelitian bagi peneliti untuk menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

#### **c. Bagi Peneliti Lain**

Manfaat penelitian bagi peneliti yang lain yaitu sebagai tambahan rujukan atau referensi yang nantinya dapat dipertimbangkan dalam penelitian yang berhubungan atau sama dengan penelitian ini dimasa akan datang.



### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

Kebijakan yang diharapkan dapat diterima dari penelitian ini yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan sistem evaluasi kinerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban yang dijalankan oleh pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan bersama yang disetiap hasilnya haruslah dipertanggungjawabkan baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Terdapat beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah diantaranya yaitu ketaatan peraturan perundangan, penerapan anggaran berbasis kinerja, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, maupun pemahaman akuntansi.

Dikarenakan situasi dan kondisi serta keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti dalam penelitian ini, sehingga peneliti hanya mengambil beberapa variabel yang dianggap perlu untuk diuji pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran. Pada penelitian ini hanya dilakukan di daerah pemerintahan kota palopo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theori*)**

Pemangku kepentingan (stakeholder) yang merupakan sebuah kelompok atau individual yang dalam hal ini dapat memberi dampak ataupun terkena dampak dari hasil yang dituju oleh suatu organisasi. Pihak-pihak yang dimaksud sebagai pemangku kepentingan yaitu politisi, masyarakat, administrasi publik lain, parlemen, bisnis dan lembaga peradilan serta media (Roberts, 1992).

Stakeholder teori menekankan bahwa akuntabilitas dari suatu organisasi jauh melebihi dari kinerja keuangan ataupun ekonomi yang sederhana. Pada teori ini, suatu organisasi akan memilih dengan sukarela serta mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka yang melebihi dari permintaan wajibnya dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi sebenarnya atau yang telah diakui para pemangku kepentingan (Rokhlinasari, 2016). Stakeholder theory menyatakan bahwa eksistensi dari sebuah perusahaan memerlukan dukungan serta kepercayaan dari para pemangku kepentingan, sehingga perusahaan juga dapat mempertimbangkan apa yang telah menjadi persetujuan dari para pemangku kepentingan.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk memenuhi keinginan dari para pemangku kepentingan. Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, keberadaan

pemangku kepentingan juga sangat mempengaruhi pola pikir dan setiap anggapan dari manajemen terhadap urgensi praktik akuntansi entitas. Suatu organisasi dan para pemangku kepentingan saling mempengaruhi dari hubungan sosial dalam bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, tepat waktu, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan valid dan berkualitas dengan begitu para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat (Kartika dan Sukanto, 2019).

Landasan teori berisikan mengenai penjelasan tentang setiap variabel yang akan diteliti dari pendefinisian serta dari uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga dalam ruang lingkup kedudukan dan prediksi akan hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah (Lubis, 2016). Uraian teori penelitian ini terdiri atas 4 kelompok teori yaitu teori sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah..

## **2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berpatokan pada pedoman umum yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang dijalankan Pemerintah Daerah diatur oleh peraturan dari gubernur / bupati / walikota yang bercermin pada pedoman umum yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan merupakan serangkaian tata kelola dalam menjalankan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi, serta merupakan bagian dari pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Sistem Akuntansi Pemerintahan telah diatur dengan Peraturan Menteri Akuntansi Keuangan setelah melakukan pengkoordinasian dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengatur mengenai pengendalian internal dan peraturan pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai rangkaian dari prosedur-prosedur secara manual dan juga secara terkomputerisasi yang dimulai dengan melakukan pengumpulan data, pencatatan, lalu pengiktisaran dan kemudian pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah.

Dari uraian diatas yang membahas mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dapat disimpulkan bahwa SAPD adalah serangkaian prosedur manual dan komputerisasi yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pada pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah.

### 2.2.1 Karakteristik Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Basis Kas

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) menggunakan basis kas dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan menggunakan basis akrual dalam neraca. Dengan basis kas, pendapatan akan diakui dan dicatat pada saat diterimanya kas oleh rekening kas daerah serta belanja akan diakui dan dicatat pada saat dikeluarkannya kas dari rekening kas daerah. Dengan kata lain, aset, kewajiban, dan ekuitas dana akan diakui dan akan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat suatu hal yang dapat mempengaruhi keuangan pemerintah.

#### 2. Sistem pembukuan berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan (*double entry system*) berdasarkan persamaan dasar akuntansi yaitu :  $Aset = Utang + Ekuitas$ . Dari setiap transaksi dibukukan dengan cara mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lainnya. Penggunaan sistem ini, tidak memungkinkan terjadinya sebuah kesalahan pencatatan atau selisih, kecuali faktor dari kesalahan manusia itu sendiri yang kemungkinan salah dalam mengklasifikasikan akun. Misalnya, akun kas yang dimasukkan ke dalam sisi hutang.

Di Indonesia sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 270/PMK.05/2014 dari tahun 2015 pemerintah diwajibkan

menggunakan basis akrual mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.71 Tahun 2010.

### **2.2.2 Tahap-tahap Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 Pasal 06 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dalam menyusun sistem akuntansi pemerintahan perlu memperhatikan beberapa tahapan yaitu :

#### **1. Identifikasi prosedur**

Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) disusun secara bertahap yang dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah, terkhususnya yang terkait dengan siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan dari siklus tersebut, tim penyusun sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

#### **2. Menentukan pihak-pihak terkait**

Setelah prosedur teridentifikasi, selanjutnya adalah menentukan pihak-pihak mana saja yang terkait pada setiap prosedur. Dari setiap pihak memiliki peranan tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan.

#### **3. Menentukan dokumen terkait**

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang terkait pada prosedur, sekaligus menentukan para pihak pengguna dokumen tersebut. Dalam hal ini, dokumen yang diperlukan adalah yang dokumen valid yang dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

#### 4. Menentukan jurnal standar

Tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi yang terkait dan hasil dari dari tim penyusun menentukan yaitu jurnal debit dan kredit yang akan digunakan dalam pencatatan.

#### 5. Menentukan dalam langkah teknis

Alur dalam pelaksanaan sistem akuntansi merupakan langkah teknis yang diterangkan oleh pihak pelaksanaan sistem akuntansi, mengenai dokumen apa saja yang diperlukan serta bagaimana para pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain dari pada itu terdapat ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi disetiap bagan alur ataupun disetiap transaksi yang membutuhkan pencatatan.

### **2.2.3 Pihak-Pihak yang Terkait dalam SAPD**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 pasal 06 ayat 1 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SAPD yang terdiri dari :

#### 1. Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Adapun pihak-pihak yang terkait diantaranya:

##### a. Pihak-pihak pelaksana sistem akuntansi pendapatan PPKD yaitu :

- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- 2) Fungsi akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

- b. Pihak-pihak pelaksana sistem akuntansi beban PPKD yaitu :
    - 1) Fungsi akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
    - 2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
    - 3) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
  - c. Pihak-pihak pelaksana sistem akuntansi aset PPKD yaitu :
    - 1) Fungsi akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
    - 2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
    - 3) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
  - d. Pihak-pihak pelaksana sistem akuntansi kewajiban PPKD yaitu :
    - 1) Fungsi akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
    - 2) Kuasa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
    - 3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
  - e. Pihak-pihak pelaksana sistem akuntansi pembiayaan PPKD yaitu :
    - 1) Fungsi akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
    - 2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
  - f. Pihak-pihak pelaksana sistem akuntansi dalam jurnal penyesuaian dan koreksi PPKD yaitu :
    - 1) Fungsi akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
    - 2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Pihak-pihak SKPD yang terkait selaku pengguna anggaran atau barang diantaranya :



- a. Pihak-pihak dalam prosedur akuntansi pendapatan SKPD yaitu :
  - 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
  - 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
- b. Pihak-pihak dalam prosedur akuntansi beban SKPD yaitu :
  - 1) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
  - 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
  - 3) Penggunaan Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
- c. Pihak-pihak prosedur akuntansi aset SKPD yaitu :
  - 1) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
  - 2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
  - 3) Pengguna Barang
  - 4) Pengelola Barang
  - 5) Pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD)
- d. Pihak-pihak prosedur akuntansi kewajiban SKPD yaitu :
  - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
  - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- e. Pihak-pihak prosedur jurnal penyesuaian dan koreksi SKPD yaitu :
  - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
  - 2) Pihak yang melakukan *Stock Opname*

### **2.3 Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7) “Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang

disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan haruslah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan yang telah ditetapkan agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari entitas lain.

Tujuan umum dari adanya laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari suatu entitas, serta pelaporan yang dapat memberi manfaat bagi para penggunanya dalam membuat atau mengambil sebuah keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah merupakan asensi dari pihak manajemen pemerintahan, menyajikan sebuah informasi yang bermanfaat dalam pengambilan sebuah keputusan, untuk menunjukkan akuntabilitas dari entitas pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan pemerintah harus dapat menyajikan sebuah informasi yang berguna bagi penggunanya dalam hal menilai akuntabilitas serta dalam membuat sebuah keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial dan politik. Makna berguna dalam laporan keuangan adalah laporan keuangan yang mampu memberikan informasi yang tepat dan dapat dipercaya, untuk itu laporan keuangan

haruslah memenuhi standar kualitatif agar menjadi sangat berguna dalam penyajian informasi.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan dari apa yang telah diperoleh dalam pengelolaan sumber daya suatu entitas, dan menyediakan suatu informasi yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan yang lebih berkualitas pada periode tertentu.

### **2.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

Faktor-faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan yaitu:

#### **1. Kompetisi Sumber Daya Manusia**

Kompetisi sumber daya manusia adalah keahlian sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan berbkalkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

#### **2. Teknologi Informasi**

Dalam konteks sistem informasi teknologi merupakan hal yang terkait dengan sistem komputer serta penggunaan jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam menyelesaikan tugas.

#### **3. Peran PPK-SKPD**

Penjabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pejabat pelaksana fungsi tata usaha keuangan SKPD.

#### **4. Rekonsiliasi**

Dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan dalam pencatatan yang akan berdampak pada validitas dan akurasi data dalam penyajian laporan keuangan,

rekonsiliasi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang kredibel, sebab dalam hal ini rekonsiliasi memegang peranan yang cukup penting.

#### 5. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern, proses integral pada tindakan atau pada kegiatan yang dilakukan dengan cara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang cukup atas pencapaian tujuan organisasi dari kegiatan yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang andal, keamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

#### **2.3.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan**

Untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan yaitu dengan mewujudkan ukuran-ukuran normatif dalam informasi akuntansi. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP laporan keuangan pemerintah haruslah memenuhi setidaknya empat karakteristik agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

1. Relevan, dalam hal ini berarti penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. Informasi yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan tidak mengandung unsur manipulasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja di masa lalu maupun sebagai pembandingan kinerja dari organisasi lain yang sejenis. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami, laporan keuangan haruslah mempunyai sebuah informasi yang jelas, sederhana serta mudah untuk dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **2.4 Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik yang bertujuan agar dimengerti oleh pihak – pihak yang bertanggungjawab atas pencapaiannya (Kenis, 1979).

Anggaran adalah rencana kerja dimasa yang akan datang oleh suatu organisasi yang menggambarkan kondisi keuangan, meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas serta estimasi . Anggaran sektor swasta adalah bagian dari sebuah rahasia perusahaan secara tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus disampaikan kepada publik untuk dikritik, dan didiskusikan untuk mendapatkan sebuah masukan.

Anggaran daerah dapat menjadi tolak ukur dari pencapaian sebuah kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus mampu menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran mengenai sejauh mana tujuan anggaran yang telah ditetapkan dengan jelas dan spesifik yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan anggaran tersebut, serta dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab akan tercapainya sasaran anggaran tersebut.

Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah untuk menyusun target anggaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga akan membantu aparatur pemerintah daerah untuk mencapai kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Sasaran anggaran yang tidak jelas akan menciptakan kebingungan, tidak tenang, serta ketidakpuasan karyawan dalam bekerja, sedangkan sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk menerima tanggungjawab dari keberhasilan

ataupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas organisasi dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari uraian paragraph diatas dapat disimpulkan bahwa, sasaran anggaran yang jelas akan meningkatkan kualitas kinerja para pegawai dibandingkan dengan sasaran anggaran yang tidak jelas yang dapat terjadi penurunan kinerja yang berarti juga akan terjadi penurunan akuntabilitas kinerja organisasi.

## **2.5 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

### **2.5.1 Kinerja**

Menurut Bastian (2001:329) dalam Verasvera (2016) kinerja adalah hal yang mengenai tingkat pencapaian dari kemampuan kinerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan untuk mewujudkan sasaran, atau tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan sebagai upaya meningkatkan kualitas dalam membuat sebuah keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai penilai dalam pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*) dengan elemen-elemen kunci sebagai berikut (Verasvera, 2016) :

- a) Perencanaan dan penetapan tujuan;
- b) Pengembangan ukuran yang relevan;
- c) Pelaporan formal atas hasil; dan
- d) Penggunaan informasi.

Tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang telah dicapai pada setiap program ataupun kegiatan dalam jangka satu tahun dari anggaran tertentu.



Tolok ukur kinerja juga digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja keuangan sistem anggaran kinerja, dan terutama dalam menilai kewajaran anggaran biaya dari suatu program ataupun kegiatan. Terdapat dua hal yang tercakup dalam tolok ukur kinerja yaitu: unsur keberhasilan dapat diukur (*output*) dan tingkat pencapaian dari setiap unsur keberhasilan (*outcome*). Setiap program ataupun kegiatan haruslah minimal mempunyai satu unsur ukuran keberhasilan dan juga tingkat pencapaian dari target kinerja yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja. Program atau kegiatan tertentu dapat pula diukur berdasarkan lebih dari satu unsur ukuran keberhasilan.

### **2.5.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan wujud dari kewajiban untuk menerima tanggungjawab akan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu misi organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran dari yang telah ditetapkan melalui sebuah media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Fathia, 2017). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah haruslah diketahui oleh rakyat dengan pemberitahuan dari pemerintah mengenai informasi yang dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dari masyarakat beserta dengan penggunaannya.

Mardiasmo (2005:21) dalam Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas publik yang seharusnya dijalankan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran merupakan suatu hal yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan,

dan akuntabilitas hukum suatu hal yang terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan akan hukum serta peraturan-peraturan lain yang dijadikan sebagai syarat dalam menggunakan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses mengenai hal dalam menjalankan tugas prosedur yang akan digunakan, apakah dinilai sudah cukup baik akan kecukupan sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi, serta prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program mengenai tujuan yang telah ditetapkan apakah dapat tercapai atau tidak, serta apakah telah ada pertimbangan alternatif program untuk hasil yang optimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan mengenai pertanggungjawaban baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atas kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah serta masyarakat luas.

### **2.5.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat berarti sebagai wujud dari tanggungjawab seseorang ataupun unit organisasi yang mengelola sumber daya yang telah dipercayakan dan dikuasai, sebagai upaya agar tercapaiannya suatu tujuan, melalui media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya yang dimaksud pada umumnya berupa dana, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan sumber daya dalam konteks negara dapat berupa sumber daya alam, aparatur pemerintah, dana, peralatan, serta kekuasaan hukum dan politik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban dari suatu instansi pemerintah dalam mengemban tanggungjawab akan keberhasilan

ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi sebagai bentuk upaya dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan AKIP yaitu sebagai berikut (LAN, 2003:7 dalam Darwanis dan Chairunnisa 2013) :

1. Komitmen haruslah ada pada pimpinan, serta seluruh staf dari sebuah instansi pemerintahan, dan perlunya melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Diharuskan sebuah sistem yang dapat menjamin penggunaan dari sumber daya secara konsisten dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku.
3. Tingkat yang telah dicapai dari tujuan dan sasaran haruslah ditunjukkan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Pencapaian visi dan misi, hasil serta manfaat yang telah diperoleh haruslah diorientasikan.
5. Sikap objektif, jujur, transparan dan aktif haruslah dimiliki sebagai upaya pendorong dalam perubahan manajemen pada instansi pemerintahan dalam pemutakhiran teknik dan metode pengukuran kinerja dan penyusunan laporan secara akuntabel.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Dasar dari sebuah penyusunan penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, berguna sebagai perbandingan serta rujukan untuk peneliti dalam penelitian selanjutnya. Berikut ada beberapa

penelitian terdahulu berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran, serta sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian yang akan dilakukan.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dina Afrina (2015). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Metode analisis data penelitian ini diantaranya analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda. teknik pengambilan sampel <i>purposive sampling</i> . Metode pengumpulan data primer dengan cara memberikan kuesioner .	Variabel Independen: penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2	Lumenta, Morasa dan Mawikere (2016). Pengaruh	Dalam penelitian ini digunakan jenis	Variabel Independen: sistem akuntansi	Sistem akuntansi pemerintah

	<p>pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>	<p>penelitian menurut tingkat eksplanasi asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.</p>	<p>pemerintah daerah.</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>	<p>daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.</p>
3	<p>Nurul Fathia (2017). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)</p>	<p>Pengumpulan data dilakukan dengan teknik <i>personally administered questionnaires</i></p>	<p>Variabel Independen: penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran.</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>

4	Bambang Pamungkas (2012). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penelitian yang digunakan adalah penelitian <i>causal relationship</i> . Menggunakan metode observasi, dan penyebaran kuesioner.	Variabel Independen: kualitas laporan keuangan  Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik.
5	Fika Mudrikah dan Karnila Ali (2018). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi	Metode kuantitatif deskriptif	Variabel Independen: kualitas laporan keuangan  Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Hasil dari penelitian ini yaitu: Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6	Fitriana, Hidayati dan Mawardi (2018). Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, Dan Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah daerah kabupaten situbondo.	Metode kuantitatif	Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran. Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah daerah kabupaten situbondo.
7	Kartika dan Sukanto (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.	Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran. Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman
8	Pratama, Agustin dan Taqwa (2019). Pengaruh	Jenis penelitian ini adalah penelitian	Variabel Independen: Kejelasan	Hasil dari penelitian ini menyatakan

	pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi.	kausatif. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi berganda.	sasaran anggaran.  Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	bahwa Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
9	Medelyn Sonya Mikoshi (2020). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja	Penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.	Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran.  Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Secara parsial (individu) kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja KONI di Sumatera Barat.
10	Yulianto dan Muthaher (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data penelitian ini merupakan cross	Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran.  Variabel dependen:	Terdapat pengaruh positif dan signifikan kejelasan sasaran anggaran

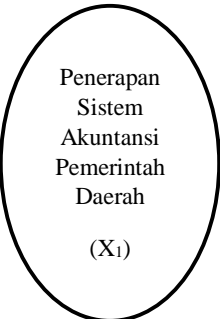
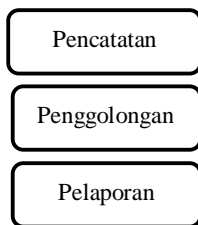


	sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pati.	section. Data diperoleh dengan cara mengirimkan kuisisioner.	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
11	Yuni Ashari (2020). Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.	Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran. Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo.

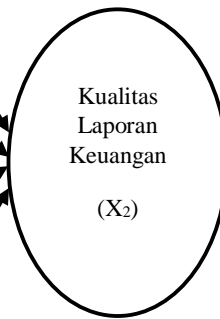
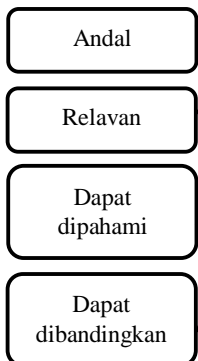
## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan dari setiap variable, adapun kerangka dari penelitian ini sebagai berikut:

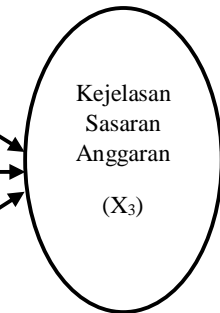
**Mendagri No. 13 Thn 2006 tentang  
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban  
Keuangan Daerah**



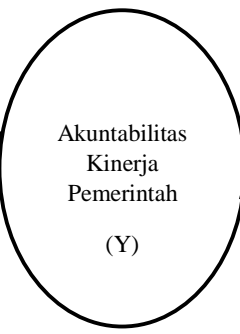
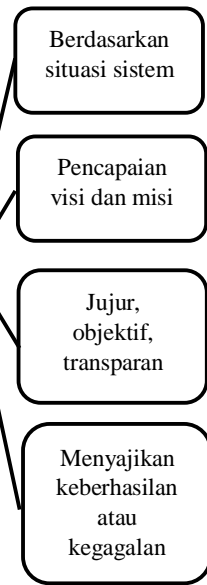
**PP No. 71 Thn  
2010 tentang SAP**



**Ginting (2010)**



**Lembaga Administrasi Negara  
(LAN) No. 239/IX/6/8/2003**



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Keterangan gambar :

= Indikator Penghubung

= Variabel yang diteliti

= Pengaruh

## 2.7 Hipotesis

Berdasarkan dari uraian kerangka konseptual dan hasil kajian empiris pada **Gambar 2.1** di atas, maka peneliti mengambil beberapa hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** : Diduga bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

**H<sub>2</sub>** : Diduga bahwa Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

**H<sub>3</sub>** : Diduga bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan dari setiap fenomena yang terjadi, dan usaha untuk mendapatkan jawaban dari hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif yang dimana menggunakan metode survey untuk mendapatkan data dari populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penyebaran kuesioner.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan untuk memperoleh data yang berasal dari responden. Pada penelitian ini akan mengambil surat permohonan izin dilokasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di Jl. Jend Sudirman No.163, Binturu, Wara Selatan., Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian yang dibutuhkan selama 2.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2014: 115) populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian menarik sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala

BPKAD, sekretariat, bidang anggaran dan perbendaharaan, bidang aset daerah dan bidang akuntansi sebanyak 112.

### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *non probability sampling*. Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Berdasarkan populasi diatas, peneliti tidak melakukan penelitian kepada semua karyawan yang berada di kantor BPKAD Kota Palopo. Namun, peneliti hanya mengambil sampel pada karyawan atau staff yang berada di bagian akuntansi atau keuangan saja. Hal itu dikarenakan judul penelitian ini mengacu kepada sistem akuntansi keuangan yang digunakan tentunya oleh bagian akuntansi atau keuangan di kantor BPKAD Kota Palopo tersebut. Dari jumlah populasi sebanyak 112 orang peneliti mengambil sampel sebanyak 40 responden dari 3 bidang di bagian keuangan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka. Jadi data kuantitatif adalah data yang cenderung dapat di analisis dengan teknik statistik dimana jawabannya berupa rentang skor atau pertanyaan yang diberi bobot.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2014:193).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik survey, yaitu dengan menyebarkan kuisioner langsung kepada kriteria responden, dan kemudian kuesioner diambil kembali oleh peneliti dengan ketetapan waktu yang telah dijanjikan responden. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert 1-5 yang dimana nilai Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Cukup Setuju (CS) diberi skor 4, Setuju (S) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

### **3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

#### **3.6.1 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat (dependen yang diberi simbol Y) yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah dan variabel bebas (independen yang diberi simbol X) yaitu penerepan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran.

#### **3.6.2 Definisi Operasional**

Berikut ini akan diuraikan definisi dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) merupakan realisasi dari setiap kegiatan dalam organisasi dengan tidak melebih-lebihkan maupun mengurang-ngurangkan apa yang telah dicapai. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja diukur dengan menggunakan empat indicator variabel, yaitu berdasarkan suatu sistem, pencapaian visi dan misi, jujur/objektif/transparan, menyajikan keberhasilan atau kegagalan.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( $X_1$ ) merupakan suatu sistem pengendali yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah pelaporan yang sesuai dengan standar dan prosedur hingga menghasilkan sebuah informasi yang layak guna dalam menetapkan sebuah keputusan. Dalam hal ini, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah diukur dengan menggunakan tiga indikator variabel, yaitu pencatatan, penggolongan, dan pelaporan.
3. Kualitas Laporan Keuangan ( $X_2$ )  
Laporan keuangan haruslah dapat menyediakan sebuah informasi dengan kualitas yang dikehendaki, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkementingan. Untuk itu laporan keuangan haruslah memenuhi karakteristik kualitatif untuk mempermudah dalam pengambilan sebuah keputusan. Ada empat karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, relevan, serta keandalan, dan dapat dibandingkan.
4. Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_3$ ) pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang mengenai sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas, dan spesifik dapat memudahkan pihak-pihak yang

bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan tiga indikator variabel, yaitu jelas, spesifik, dan mengerti.

### **3.7 Instrumen Penelitian**

Instrumen pada penelitian ini berupa kuesioner yang dimana terdapat tiga instrumen yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran. Instrumen dikembangkan dengan menggunakan skala Likert dengan lima skala. Skor terendah diberi angka 1 dan tertinggi diberi skor 5.

### **3.8 Metode Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program *SPSS versi 23* dengan menggunakan metode uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Analisis yang digunakan terhadap data antara lain: Uji Validitas, uji Reabilitas, uji analisis regresi linier berganda dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji t dan uji F.

#### **3.8.1 Analisis Deskriptif**

Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam pengolahan data yaitu analisis deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik responden. Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk mengetahui persepsi responden pada penelitian melalui perhitungan rata-rata jawaban yang telah ditabulasi, dimana akan memperlihatkan indikator yang paling besar hasilnya baik pada variabel (Sugiyono, 2014).



Dengan metode penelitian yaitu deskriptif untuk melihat/menggambarkan tentang masalah yang dihadapi dan menjelaskan hasil perhitungan dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Untuk itu Metode yang digunakan peneliti dalam mengukur jawaban responden pada pengisian kuesioner adalah dengan menggunakan metode skala likert. Menurut Sugiyono (2014 : 93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun kriteria penilaian untuk mengetahui jumlah rata-rata skor dalam setiap indikator. Dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{banyak kelas interval}}$$

Keterangan:

Rentang = nilai tertinggi – nilai terendah

Banyak kelas interval = 5

Berdasarkan rumus diatas maka kita dapat menghitung panjang kelas interval sebagai berikut:

$$P = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Setelah menghitung interval dari kriteria penilaian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Alternatif Jawaban dengan Skala Likert

4.21 – 5.00	Sangat Setuju (SS)
3.41 – 4.20	Setuju (S)
2.61 – 3.40	Cukup Setuju (CS)
1.81 – 2.60	Tidak Setuju (TS)
1.00 – 1.80	Sangat Tidak Setuju (STS)

### 3.8.2 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

#### 1. Uji Validitas

Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk mengevaluasinya harus valid. Dengan kata lain, Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Arikunto (2009: 58) dalam Ramadhani (2016) yang menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjang tingkat validitas atau kesahihan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel untuk mengukur tingkat validitas angket yang diteliti secara tepat.

Kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf signifikan 0,05 maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid (Arikunto dalam Ramadhani, 2016).

#### 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen, oleh karena itu walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan (Ramadhani 2016). Reliabilitas digunakan

untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha yaitu: Dengan kriteria pengujian  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat ukur tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka alat ukur tersebut tidak reliable.

### 3.9 Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palopo yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi berganda.

Menurut Algfari (2000:62) dalam Ashari (2020) penggunaan formulasi regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan :

**Y** = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

**B<sub>0</sub>** = Konstanta

**B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>** = Koefisien Regresi

**X<sub>1</sub>** = Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

**X<sub>2</sub>** = Kualitas Laporan Keuangan

**X<sub>3</sub>** = Kejelasan Sasaran Anggaran

**e** = Error

### **3.10 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.10.1 Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2007) uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal. Salah satu cara agar data dapat berdistribusi normal adalah dengan menggunakan lewat pengamatan nilai residual. Cara lain dengan melihat distribusi dan variabel-variabel yang akan diteliti. Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal. Teknik uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov.

Uji normalitas ini dilakukan terhadap distribusi variable inventarisasi, identifikasi, legal audit, dan penilaian. Kriteria dalam pengujian normalitas dalam pengujian ini adalah jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data variabel terdistribusi secara normal. Jika p-value lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data variabel terdistribusi secara tidak normal. Pengujian ini ntuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian, maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik pada multikolinieritas, heteroskedastisitas.

#### **3.10.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF) serta besaran korelasi antara variabel independen.

### 3.10.3 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dilakukan dengan teknik Uji Glesjer. Uji Glesjer dilakukan untuk mereges nilai absolute residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) dengan persamaan regresi  $Ut = \alpha + \beta Xt + vt$ .

### 3.11 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi yang masih bisa ditoleransi ditetapkan 0,001 ( $\alpha=1\%$ ), 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) atau 0,10 ( $\alpha = 10\%$ ).

#### 3.11.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variable independen secara individual terhadap variable dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variable independen secara individual terhadap variable dependen digunakan tingkat signifikan 5% atau 0.05. Jika probability t lebih besar 0.05 maka tidak ada pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0.05 maka terdapat pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen (koefisien signifikan) (Sugiyono, 2014).

### **3.11.2 Uji F**

Uji F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel indeviden yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau devenden.

### **3.11.3 Koefisien Determinasi / *R* Square**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipergunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh variabel

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kantor BPKAD Kota Palopo**

##### **4.1.1 Sejarah singkat Pemerintah Daerah BPKAD Kota Palopo**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 yang membahas tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

##### **4.1.2 Tugas dan fungsi BPKAD Kota Palopo**

Secara umum kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan berdasarkan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) Penyelenggaraan kegiatan teknik operasioanal dan fungsional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pelakasaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga berperan sebagai pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus bendahara umum daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **4.1.3 Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, maka ditetapkan visi organisasi yaitu : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Berkualitas”.



**b. Misi**

Untuk menetapkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatkan kualitas sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

**4.1.4 Tujuan dan Sasaran****a. Tujuan**

1. Mewujudkan aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan kompetensi.
2. Meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah yang memenuhi prinsip pelayanan publik.

**b. Sasaran**

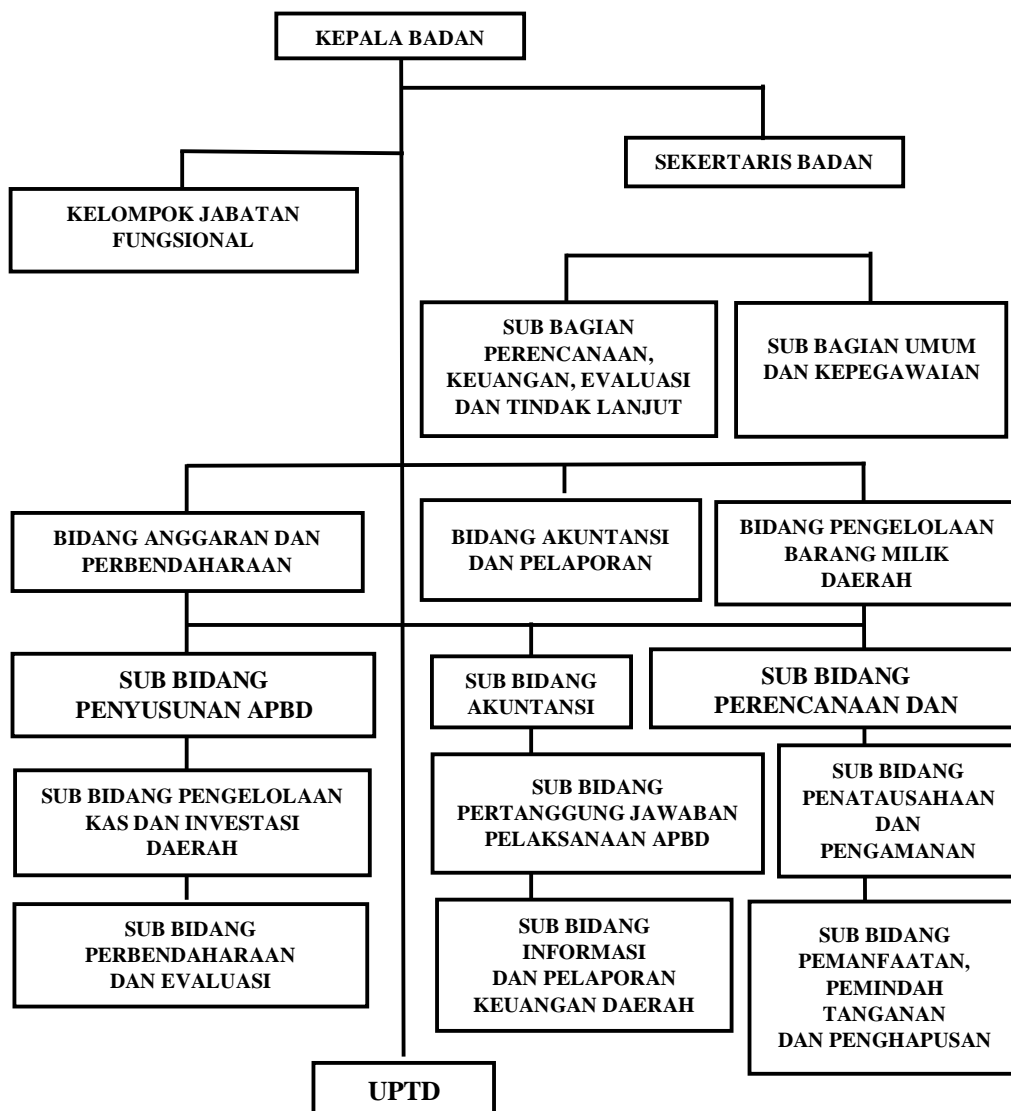
Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo yaitu

1. Meningkatkan dedikasi tanggungjawab, wawasan dan kompetensi aparat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Meningkatkan proporsi pendapatan daerah dalam pemenuhan kemandirian keuangan daerah
3. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan
4. Terpenuhinya pengelolaan aset daerah yang tepat, efisien dan efektif.

5. Terwujudnya pelayanan pengelolaan dan Manajemen aset daerah yang sederhana, jelas, aman bertanggungjawab dan mudah diakses.

#### 4.1.5 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

Dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo terdapat susunan organisasi yaitu sebagai berikut :



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

## **4.2 Deskripsi Variabel**

### **4.2.1 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan sebuah rangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, lalu pencatatan, pengiktisaran, hingga pada menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dilakukan baik secara manual ataupun dengan menggunakan aplikasi komputer. Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah untuk menggantikan PP No 24 Tahun 2005.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang yang mempunyai tugas untuk menyusun serta menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya. BPKAD Kota Palopo adalah salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun pelaksanaan pendapatannya adalah dengan Menyusun Laporan Keuangan Pendapatan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD Kota Palopo mengacu pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah. Laporan keuangan BPKAD Kota Palopo telah disusun dengan basis Kas pada Laporan Realisasi Anggaran dan

basis AkruaI pada Laporan Operasional sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan keuangan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas atau tanggungjawab serta transparansi pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kota Palopo.

Perlakuan akuntansi pendapatan pada BPKAD Kota Palopo yang terkait dengan penerapan PP 71 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di BPKAD Kota Palopo.
2. Pendapatan LRA di BPKAD Kota Palopo diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD). Akuntansi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
3. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Laporan Operasional di BPKAD kota Palopo.
4. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali. Pendapatan LO di BPKAD Kota Palopo diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan LO

dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan mambekukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettomy (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Laporan Operasional (LO) disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Berdasarkan hasil dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di kantor BPKAD Kota Palopo termasuk kedalam kategori sangat baik. Dan hal ini juga didasari dari tanggapan responden mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari tiga indikator yaitu pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Berdasarkan pengklasifikasian dari jumlah skor yang masuk dalam kategori sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo telah sesuai.

#### **4.2.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Palopo yang terdiri dari empat indikator sebagai berikut :

1. **Andal**, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dalam hal ini berdasarkan dari tanggapan para responden yang menunjukkan tanggapan yang sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada BPKAD Kota Palopo sudah dikatakan baik karena sudah andal dalam penyajian jujur, kesalahan material sesuai fakta dan dapat diferifikasi.

2. **Relavan**, laporan keuangan dapat dikatakan relavan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dimasa lalu. Dalam hal ini berdasarkan dari tanggapan para responden yang menunjukkan tanggapan yang sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Palopo sudah dapat membantu mengevaluasi kejadian di masa lalu serta membantu memprediksi kejadian di masa yang akan datang.
3. **Dapat dibandingkan**, laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Dalam hal ini berdasarkan dari tanggapan para responden yang menunjukkan tanggapan yang sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada BPKAD Kota Palopo dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
4. **Dapat dipahami**, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan di BPKAD Kota Palopo maupun pengguna eksternal.

#### **4.2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran

tersebut. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Halim dan Syam (2012) mengatakan bahwa anggaran memiliki peranan penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Anggaran Pemerintah Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik, dan merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah.

Menurut Abdullah (2004) indikator anggaran yaitu:

1. **Jelas**, Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.
2. **Spesifik**, Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan intepretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
3. **Dapat dipahami**, Sasaran yang dibuat secara jelas dan spesifik harus dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak akan terjadi sebuah kesalahan dalam pencapaiannya,

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran pada BPKAD Kota Palopo telah melaksanakan anggaran secara efektif

yang ditentukan oleh usaha yang dikerahkan, kemampuan dan kualitas seseorang partisipasi, penetapan sasaran, serta persepsi seseorang tentang tugas dan kewajiban. Rencana kerja dan sasaran kerja pada BPKAD Kota Palopo telah terdefiniskan dengan jelas dan konfrensif, serta penentuan sasaran kerja dan anggaran mudah dipahami dan dimengerti sehingga dapat diaplikasikan sesuai tujuan.

#### **4.2.4 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP (2000) “akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. Oleh sebab itu, semua instansi pemerintah bagian atau lembaga Negara di pusat maupun di daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas RPJMD Kota Palopo Tahun 2019-2023. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Palopo telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja merupakan hasil kerja keras seluruh aparat pemerintah Kota Palopo sebagai kota serta pihak yang terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Kota Palopo sebagai



kota yang maju, inovatif dan berkelanjutan pada tahun 2023. Pemerintah Kota Palopo secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 78,93% yang dihitung berdasarkan presentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

### 4.3 Karakteristik Responden di BPKAD Kota Palopo

Responden pada penelitian ini adalah para pegawai di BPKAD Kota Palopo khususnya pada pihak-pihak yang memiliki wewenang dan terlibat dalam mengelola anggaran serta pelaporan keuangan. Pengambilan data pada penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada para pegawai yang merupakan sampel penelitian ini, adapun jumlah kuesioner yang dibagikan yaitu sebanyak 40 kuesioner. Dari 40 kuisoner yang disebar ke 30 responden yang berada di Bagian staff akuntansi atau keuangan, hanya 37 kuisoner yang kembali dan dapat diolah untuk pengujian hipotesis. Dalam hal ini, sebanyak 37 kuesioner telah memenuhi syarat untuk diolah dan telah memenuhii sebuah aturan umum sampel minimum yang telah disyaratkan dalam penggunaan analisis faktor. yang telah terpilih menggunakan sampel jenuh ataupun sensus. Demografi responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamiin, tingkat pendidikan, usia dan lamanya bekerja atau masa kerja responden yang dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel.4.1** Jumlah Respoden

		Statistics			
		Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Lamanya bekerja
N	Valid	37	37	37	37
	Missing	0	0	0	0

### 4.3.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

**Tabel 4.2** Deskripsi Jenis Kelamin Responden

Keterangan	Jumlah (orang)	Presentasi
<b>Jenis Kelamin:</b>		
a. Laki-Laki	21	58.1
b. Perempuan	16	41.9
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Pada **Tabel 4.2** di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang atau sebesar 41.9% responden berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 21 orang atau sebesar 58.1 % responden berjenis kelamin laki-laki.

### 4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Data yang telah terkumpul dan diperoleh distribusi tingkat pendidikan dari para responden, dilihat pada **Tabel 4.3** .

**Tabel 4.3** Deskripsi Pendidikan Responden

Keterangan	Jumlah (orang)	Presentasi
<b>Tingkat Pendidikan:</b>		
a. SMA	7	20.9%
b. Diploma	4	10.0%
c. Strata -1 (S1)	24	67.0%
d. Strata -2 (S2)	2	2.1%
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Berdasarkan **Tabel 4.3** di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir responden yang dominan dalam penelitian ini adalah Strata-1 (S1) sebanyak 24 orang atau sebesar 67.0% responden, lulusan SMA yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 20.0% responden, Diploma sebanyak 4 orang atau sebesar 11.4% responden, 2 orang atau sebesar 2.0% responden berpendidikan Strata-2 (S2).

### 4.3.3 Karakteristik Berdsarkan Usia

**Tabel 4.4** Deskripsi Usia Responden

Usia	Jumlah Orang	Presentasi
>21-25	4	10.8%
26-30	14	37.8%
31-35	4	10.8%
36-45	12	32.4%
>45	3	8.2%
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan pada **Tabel 4.4** di atas dapat dikatakan bahwa yang menjadi responden pada penelitian ini mulai dari usia >21-45 tahun. Responden terbanyak yang tercatat sebanyak 14 orang atau sebesar 37.8% yaitu usia 26-30 tahun yang secara umum dapat dikategorikan sebagai pribadi yang dapat menggambarkan kematangan pribadi, keterampilan, memiliki banyak pengalaman, dan juga semakin bertambahnya pengetahuan, serta kemampuan pada rentang usia tersebut.

### 4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

**Tabel 4.5** Karakteristik Lama Bekerja

Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Presentasi
0-3	7	20.0%
4-10	21	57.1%
>11	9	22.9%
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan **Tabel 4.5** di atas dapat disimpulkan bahwa lama kerja responden dalam penelitian ini dimulai dari 3-11 Tahun. Responden yang telah melalui masa kerja 10 Tahun merupakan yang paling banyak. Lamanya masa kerja yang dimiliki oleh responden memiliki hubungan dengan karakteristik usia

responden yang memiliki masa kerja. 10 tahun merupakan pegawai yang sudah memiliki masa kerja yang sudah sangat cukup baik bagi pemerintah daerah di BPKAD Kota Palopo. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik.

#### **4.4 Analisis Persepsi Pegawai Terhadap variabel**

Analisis dalam persepsi pegawai mengenai penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran pada BPKAD Kota Palopo dilakukan dengan metode skala likert yaitu rata-rata skor. Nilai rata-rata skor tersebut menunjukkan penilaian tingkat kesetujuan pegawai terhadap pernyataan dalam kuesioner yang diberikan peneliti, karena kuesioner yang dibagikan dalam penelitian bersifat kuantitatif, maka data informasi, dan keterangan yang diberikan oleh responden harus dikuantitatifkan.

#### **4.5 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai mana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum Sugiono (2012). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata-rata 38 (mean), standar deviasi nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 22 sebagai berikut:

**Tabel 4.6** Deskriptif Statistik Frekuensi Jawaban Responden

Variabel	Frekuensi					Total Sampel
	SS	CS	S	CS	TS	
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X <sub>1</sub> )	16	16	5	0	0	37
Kualitas Laporan Keuangan (X <sub>2</sub> )	18	17	2	0	0	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>3</sub> )	18	13	6	0	0	
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	14	18	5	0	0	

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Berdasarkan **Tabel 4.6** di atas menunjukkan bahwa dari 37 responden untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X<sub>1</sub>) menjawab “Sangat Setuju” (SS) 16 orang, yang menjawab “Cukup Setuju” (CS) 16 orang, menjawab “Setuju” (S) 5 orang. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X<sub>2</sub>) yang menjawab “Sangat Setuju” (SS) 18 orang, yang menjawab “Cukup Setuju” (CS) 17 orang, menjawab “Setuju” (S) 2 orang. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X<sub>3</sub>), yang menjawab “Sangat Setuju” (SS) 18 orang, dan yang menjawab “Cukup Setuju” (CS) 13 orang, menjawab “Setuju” (S) 6 orang. Dan Variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y), yang menjawab “Sangat Setuju” (SS) 14 orang, dan yang menjawab “Cukup Setuju”(CS) 18 orang, dan menjawab “Setuju” (S) 5.

## 4.6 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

### 4.6.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan cara statistic, menghitung korelasi antara setiap pertanyaan dengan skor total, menggunakan metode *produc moment personcorrelation*. Data dinyatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai item dari *corrected item-total correlation* > dari r table pada signifikan 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut.

**Tabel 4.7** Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Person Correlation	R tabel (Taraf signifikansi 5%)	Ket
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X <sub>1</sub> )	X <sub>1.1</sub>	0.334	0.324	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0.480		Valid
	X <sub>1.3</sub>	0.349		Valid
	X <sub>1.4</sub>	0.386		Valid
	X <sub>1.5</sub>	0.442		Valid
	X <sub>1.6</sub>	0.364		Valid
	X <sub>1.7</sub>	0.337		Valid
	X <sub>1.8</sub>	0.329		Valid
	X <sub>1.9</sub>	0.630		Valid
	X <sub>1.10</sub>	0.396		Valid
	X <sub>1.11</sub>	0.334		Valid
	X <sub>1.12</sub>	0.379		Valid
	X <sub>1.13</sub>	0.329		Valid
Kualitas Laporan Keuangan (X <sub>2</sub> )	X <sub>2.1</sub>	0.358	0.324	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0.494		Valid
	X <sub>2.3</sub>	0.469		Valid
	X <sub>2.4</sub>	0.473		Valid
	X <sub>2.5</sub>	0.392		Valid
	X <sub>2.6</sub>	0.416		Valid
	X <sub>2.7</sub>	0.384		Valid
	X <sub>2.8</sub>	0.387		Valid
	X <sub>2.9</sub>	0.475		Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>3</sub> )	X <sub>3.1</sub>	0.596	0.324	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0.379		Valid
	X <sub>3.3</sub>	0.494		Valid
	X <sub>3.4</sub>	0.596		Valid
	X <sub>3.5</sub>	0.399		Valid
	X <sub>3.6</sub>	0.440		Valid
	X <sub>3.7</sub>	0.447		Valid
	X <sub>3.8</sub>	0.411		Valid
	X <sub>3.9</sub>	0.494		Valid
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	X <sub>1.1</sub>	0.390	0.324	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0.397		Valid
	X <sub>1.3</sub>	0.428		Valid
	X <sub>1.4</sub>	0.530		Valid
	X <sub>1.5</sub>	0.437		Valid
	X <sub>1.6</sub>	0.411		Valid
	X <sub>1.7</sub>	0.389		Valid
	X <sub>1.8</sub>	0.478		Valid
	X <sub>1.9</sub>	0.426		Valid
	X <sub>1.10</sub>	0.433		Valid
	X <sub>1.11</sub>	0.513		Valid
	X <sub>1.12</sub>	0.449		Valid

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Berdasarkan **Tabel 4.7** menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner untuk semua variabel dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk analisis selanjutnya. Dalam hal ini, diasarkan pengambilan keputusan, nilai  $R_{hitung} \geq$  nilai  $R_{tabel}$  pada signifikan 0,05 (5%).

#### 4.6.2 Uji Realibilitas

Realibilitas dipergunakan untuk mengukur kuesioner dari indikator setiap variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable ketika jawaban responden itu stabil dari waktu ke waktu, dan akan dikatakan reliable Ketika memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $\geq$  0,60.. Nilai ketentuan dalam mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ).

**Tabel 4.8** Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Realibilitas	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( $X_1$ )	0.624	0.60	Reliable
Kualitas Laporan Keuangan ( $X_2$ )	0.700		Reliable
Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_3$ )	0.709		Reliable
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	0.650		Reliable

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Berdasarkan **Tabel 4.7** diatas dapat menyatakan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini telah reliable, dan secara keseluruhan telah memenuhii syarat karena variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $\geq$  0,60 sehingga layak untuk digunakan sebagai alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini.

## 4.7 Uji Asumsi Klasik

### 4.7.1 Uji Normalitas

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidaknya dalam uji normalitas yaitu dengan cara analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas ini akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov Smirnov, jika nilai signifikansi  $>0.05$  maka nilai residual berdistribusi norma dan jika nilai signifikansi  $< 0.05$  maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.8** Hasil Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.65444616
Most Extreme Differences	Absolute	.181
	Positive	.122
	Negative	-.181
Kolmogorov-Smirnov Z		1.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.178

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa nilai signifikansi  $0.178 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan p-plot yaitu dengan ketentuan apabila titik-titik terlihat mendekati garis diagonal maka distribusi data dianggap normal.

### 4.7.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya



multikolinieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF) serta besaran korelasi antara variabel independen. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji multikolinieritas.

**Tabel 4.9** Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.080	1.255		1.657	.107		
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	.480	.255	.341	1.885	.068	.827	1.210
	Kualitas Laporan Keuangan	.110	.207	.096	.532	.598	.831	1.203
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.121	.192	-.122	-.629	.534	.714	1.400

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel diatas, dapat diketahui nilai tolerance yang diperoleh dari masing-masing variabel adalah  $> 0,10$  maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Selain itu nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah sebesar 1.210 untuk penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, 1.203 untuk kualitas laporan keuangan, sedangkan untuk kejelasan sasaran anggaran sebesar 1.400. dari ketiga variabel tersebut masing-masing nilai VIF  $< 10,00$  maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

### 4.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dilakukan dengan teknik Uji Glesjer. Uji Glesjer dilakukan untuk mereges nilai absolute residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) dengan persamaan regresi  $Ut = \alpha + \beta Xt + vt$ .

Jika variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.10** Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.595	1.649		.656	.519
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	.004	.032	.004	-.002	.898
	Kualitas Laporan Keuangan	-.097	.077	-.039	-.906	.472
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.084	.099	.306	1.849	.274

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Hasil output diatas, menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute  $Ut$  (Abs $Ut$ ). Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikannya tingkat

kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

#### 4.8 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11** Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.080	1.255		1.657	.107
	PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMDA	.480	.255	.341	1.885	.068
	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	.110	.207	.096	.532	.598
	KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	-.121	.192	-.122	-.629	.534

a. Dependent Variable: AKUNTANBILITAS KINERJA PEMERINTAH

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Dari tabel di atas yang merupakan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh koefisien variabel bebas Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0.068, koefisien variabel bebas Kualitas Laporan Keuangan ( $X_2$ )

sebesar 0.598, dan koefisien variabel bebas Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_3$ ) sebesar 0.534. Dengan begitu, persamaan regresi yang diperoleh yaitu:

$$Y = 2.080 + 0.480 x_1 + 0.110 x_2 - 0.121 x_3 + e$$

Keterangan :

<b>Y</b>	= Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
<b>B<sub>0</sub></b>	= Konstanta
<b>X<sub>1</sub></b>	= Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
<b>X<sub>2</sub></b>	= Kualitas Laporan Keuangan
<b>X<sub>3</sub></b>	= Kejelasan Sasaran Anggaran
<b>e</b>	= Error

Persamaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik diatas sebesar 2.080 yang berarti apabila variabel bebas bernilai 0 (nol) maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada kantor BPKAD kota palopo tetap sebesar 2.080.
2. Nilai ( $\beta_1$ ) sebesar 0.480 menunjukkan bahwa pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( $X_1$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah **positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar satu satuan, maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0.480.
3. Nilai koefisien ( $\beta_2$ ) sebesar 0.110 menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) adalah **positif**

**atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar satu satuan, maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0.110.

4. Nilai koefisien ( $\beta_3$ ) sebesar -0.121 menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_3$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) adalah **negatif atau tidak searah**, artinya jika ditingkatkan variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami penurunan sebesar 0.121.

#### 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis

##### 4.9.1 Uji koefisien determinasi adjusted (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12** Koefisien Determinasi Adjusted R

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.330 <sup>a</sup>	.109	.028	.68355
a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Laporan Keuangan , Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah				

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary” diatas yang ditunjukkan oleh R Square dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,109. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan variabel independen yang terdiri dari penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel dependen akuntabilitas

kinerja pemerintah adalah sebesar 10,9% sedangkan sisanya 89,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor–faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

#### 4.9.2 Hasil Uji parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel serta membandingkan nilai signifikan t dengan level of signifikan ( $\alpha$ ). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak, bila  $H_0$  ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40).

**Tabel 4.13** Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.080	1.255		1.657	.107
	PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMDA	.480	.255	.341	1.885	.008
	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	.510	.107	.296	2.532	.006
	KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	.721	.192	.322	3.629	.009

a. Dependent Variable: AKUNTANBILITAS KINERJA PEMERINTAH

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Berdasarkan dari **Tabel 4.13** diketahui nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} T \text{ tabel} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\ &= 37 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\ &= 33 : 0,025 \\ &= 1.320 \end{aligned}$$

**Keterangan:**

- n = jumlah
- K = jumlah variabel bebas
- 1 = konstan

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Hasil pengujian hipotesis  $H_1$

$H_1$  : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Untuk melihat pengaruh dari Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah digunakan uji statistik t. Bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana t hitung  $>$  t tabel dan sig. t  $<$  a = 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan jika sebaliknya t hitung  $<$  t tabel dan sig.t  $>$  a=0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dari **Tabel 4.13** di atas dapat dilihat bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu 1,885  $>$  1,320 dan  $\text{sig.}t$  (0,008)  $<$  0,05 dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima maka Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah **berpengaruh** terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

## 2. Hasil pengujian hipotesis $H_2$

$H_2$  : Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Untuk melihat Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah digunakan uji statistik  $t$ . Bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan  $\text{sig.}t < a = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima dan jika sebaliknya  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel dan  $\text{sig.}t > a = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak.

Dari **Tabel 4.13** di atas dapat dilihat bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu 2,532  $>$  1,320 dan  $\text{sig.}t$  ( 0,006)  $<$  0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Kualitas Laporan Keuangan **berpengaruh** terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

## 3. Hasil Pengujian Hipotesis $H_3$

$H_3$  : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.



Untuk melihat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan uji statistik t. bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana t hitung  $>$  t tabel dan sig.  $t < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima dan jika sebaliknya t hitung  $<$  t tabel dan sig.  $t > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.

Dari **Tabel 4.13** di atas dapat dilihat bahwa t hitung  $>$  t tabel yaitu 3,629  $>$  1,320 dan sig.t (0,009)  $<$  0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran **berpengaruh** terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

#### 4.9.3 Hasil Uji Simultan (uji F)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji F ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.14** Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.879	3	.626	1.340	.002 <sup>b</sup>
	Residual	15.419	33	.467		
	Total	17.297	36			
a. Dependent Variable: AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH						
b. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Laporan Keuangan , Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah						

Sumber : Data primer, diolah di SPSS 2021

Pada **Tabel 4.14** di atas dapat di lihat nilai F sebesar 1,340 dengan nilai signifikannya 0,002 nilai signifikan tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat di gunakan untuk memprediksi akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kata lain, **Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Secara Bersama-Sama (simultan) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.**

#### **4.10 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.10.1 Pengaruh Penerapan SAPD Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo**

Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu menguji apakah terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_1$ ) sebesar 0,480 dan memiliki nilai signifikansi  $0,008 < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kata lain  $H_1$  **diterima**. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada pemerintah Kota Palopo semakin baik, maka akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kota Palopo akan semakin meningkat.

#### **4.10.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo**

Hipotesis kedua penelitian ini yaitu menguji apakah terdapat pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Dalam hal ini, terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_2$ ) sebesar 0,510 dan memiliki nilai signifikansi  $0,006 < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kata lain  $H_2$  **diterima**.

#### **4.10.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sistem kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_3$ ) sebesar 0,721 dan memiliki nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kata lain  $H_3$  **diterima**. dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggarannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis, pengujian dan pembahasan hipotesis yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo, dengan itu dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Dalam hal ini, hipotesis pertama diterima.
2. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Dalam hal ini, hipotesis kedua diterima.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo. Dalam hal ini, hipotesis ketiga diterima.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan semaksimal mungkin, namun pada penelitian ini masih terdapat berbagai keterbatasan yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasannya yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode dengan menyebarkan kuesioner dengan responden yang terbatas, dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan sampel karna siapapun dapat mengisi kuesioner yang ada dalam kantor BPKAD.
2. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran untuk mengetahui pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan penelitian, beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, Adapun sarannya yaitu:

1. Peneliti selanjutnya agar bisa mendapat hasil yang maksimal diperlukan sampel yang lebih banyak, serta tidak hanya sebatas dengan penyebaran kuesioner saja, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan dokumentasi, pengamatan, wawancara langsung serta abservasi.
2. Peneliti selanjutnya agar bisa menambahkan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, H. 2004 *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Afrina, Dina. 2015. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 2(2): 1–15.
- Aprilianti, Dewi, Mulyaning Wulan, and Herwin Kurniawan. 2020. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Ashari, Yuni. 2020. “Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Darma, Dito Aditia. 2019. “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah.” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 9(2): 30–43.
- Darwanis, and Sephi Chairunnisa. 2013. “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*.
- Fathia, Nurul. 2017. “Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).” *JOM Fekon* 4(1): 670.
- Fauzan, Reyhan Hady. 2017. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).” 4(1): 1–13.
- Fitriana, Riska Dwi, Nur Hidayati, and Muhammad Cholid Mawardi. 2018. “Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta

- Hs Ginting. 2010. "Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah." *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kartika, Rusnanda Dian, and Sukamto. 2019. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya)." *LIABILITY*.
- Kenis, Izzettin. 1979. "The Effect of Budgetary Goal Characteristics on Manajerial Attitudes and Performance." *Accounting Review* 54 (4): 707–721.
- Lembaga Administrai Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. (2000). *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI*.
- Lubis, A. F. 2016. Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis. USU Press.Medan.
- Lumenta, Agnestasia Laura, Jenny Morasa, and Lidia Mawikere. 2016. "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan)." *Jurnal EMBA*.
- Mardiasmo. 2002. "Akuntansi Sektor Publik." *Yogyakarta: Andi*.
- Mikoshi, Medelyn Sonya. 2020. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)." *Ekonomis: Journal of Economics and Business*.
- Mudrikah, Fika, and Karnila Ali. 2018. "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan* 3: 111–27.
- Oktaviani, Silvi. 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah." *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*.
- Pamungkas, Bambang. 2012. "Jurnal Ilmiah Ranggagading Pengaruh Penerapan

Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Ranggagading*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 270/PMK.05/2014 Tahun 2015 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pratama, Rio, Henri Agustin, and Salma Taqwa. 2019. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Skpd Bengkalis).” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.

Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

———. 2014. “Open Library - Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” *Alfabeta*.

———. 2016. *Alfabeta, cv. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Verasvera, Febrina astra. 2016. “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.” *Jurnal Manajemen Maranatha*.

Yulianto, Ahmad Rudi, and Osmad Muthaher. 2019a. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati.” *Tirtayasa Ekonomika* 14(2): 204.

———. 2019b. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati.” *Tirtayasa Ekonomika*.